

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Marzuki, Didi (Ed), 2000, *Bekerja Demi Rakyat: Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Komunal, Jakarta
- Sianipar, 1998, *Ekologi Administrasi Negara*, Informatika Bandung, Bandung
- Hadjon, Philipus M., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetatakan Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Lembaga Administrasi Negara, 2017, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayanan Publik*, LAN, Jakarta
- Salim HS, H., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adjie, Habib, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Santoso, Urip, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2007, *PPAT Sejarah, Tugas dan Kewenangannya*, Renvoi, Jakarta
- Peranginangin, Effendi, 2007, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XXV, Pradnya Paramita, Jakarta

- Termoshuizen, Marjanne, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Adjie, Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung
- Harsono, Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Ed. Revisi. Cet. 12, Djambatan, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismaya, Samun, 2018, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Edisi 2, Suluh Media, Yogyakarta
- Soeroso, R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Zuriah, Nurul, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Mungin, Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Winangun SJ, Y. Wartaya, 2004, *Tanah Sumber Nilai Hidup*, Cetakan 1, Kanisius,
Yogyakarta

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah*, Kencana, Jakarta

Alamsyah D, Nandang, 2018, *Administrasi Pertanahan*, Cet. 16, Universitas Terbuka,
Tangerang Selatan

Kansil, C.S.T., 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindakan Administrasi
Negara*, Alumni, Bandung

Ragawino, Bewa, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, FISIPOL UNPAD, Bandung

Hartanto, Wahyu, “Kesesuaian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam
Pertimbangan Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Panitia B,” FH
Universitas Brawijaya, Malang

Basah, Sjachran, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*,
Sinar Harapan, Bandung

2. Jurnal

Sujastiawan, Ade, *Studi Pelayanan Publik Terhadap Sertifikasi Tanah di Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa*, *Jurnal Fisip*, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan Universitas Samawa Sumbawa Besar (UNSA), Sumbawa Besar

Ervina, Vuji, 2013, *Pelayanan Pendaftaran Tanah oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) Sementara di Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan*

Barito Selatan, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2,
Juli-Desember

Ridwan, 2003, *Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum
Administrasi Negara*, JURNAL HUKUM. NO. 22 VOL 10. Januari

Winarsi, Sri, 2002, *Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum*, Majalah
YURIDIKA, Volume 17 No.2, Maret

La Ode Raumin, La Ode Monto Bouto, dan Bakri Yusuf, 2018, *Bentuk-Bentuk Sanksi
Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja: Studi Di Desa
Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*, Neo Societal; Vol. 3; No. 1

Aditama, Purna Noor, 2018, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam
Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas
Tanah Melalui Jual Beli*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 3, Nomor 1, Januari

Baharudin, 2014, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual
Beli Tanah*, Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1, Maret

R.Tumengkol, Alent, 2015, *Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam
Rangka Good Governance. Lex Administratum*, Vol. III, No.1, Januari-Maret

3. Tesis/Skripsi

Ferial, Muhammad, 2009, “Pelaksanaan Pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah
oleh Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar”, *Tesis*, Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Zulkarnain, Ockhy Loedvian, 2019, “Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bantu”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

4. Peraturan Perundangan

a. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

c. Putusan Mahkamah Agung

Risalah Sidang Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018, tanggal 23 April 2018

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/TUN/1999, tanggal 8 Februari 2000

d. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 1961 tentang Bentuk Akta

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Runag Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

e. Peraturan Lainnya

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perakaban Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penetapan
Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah

f. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sanksi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/SANKSI>,
diakses tanggal 15 November 2020 pukul 08.40 WIB

Sigar Aji Poerana, “Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator”,
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-
putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator), diakses tanggal 1 Juni 2021
pukul 15.30 WIB

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Daftar PPAT”,
<https://www.atrbpn.go.id/?menu=daftarPPAT>, diakses tanggal 21 Juni 2021 pukul
12.30 WIB